

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA**

#### **PENCURIAN ALIRAN LISTRIK**

**(Studi Kasus di Kota Makassar Pada Tahun 2008-2011)**



**Oleh**

**FITRI E.T FAUZI**

**B 111 10 256**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2014**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN ALIRAN LISTRIK  
(Studi Kasus di Kota Makassar Pada Tahun 2008-2011)**

**OLEH:**

**FITRI E.T FUZI  
B111 10 256**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**M A K A S S A R  
2014**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR PADA TAHUN 2008-2011)**

Disusun dan diajukan oleh:

**FITRI E.T FAUZI  
NIM B11110256**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM**  
NIP. 19641231 198811 1 001

**Hj.Haeranah, S.H.,M.H**  
NIP. 196612121991032002

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.**  
NIP. 1963041919890313003

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Fitri E.T Fauzi  
Nomor Induk : B 111 10 256  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana  
Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus di Kota  
Makassar Pada Tahun 2008-2011)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam Ujian  
Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

**Makassar, Februari 2014**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S. DFM**  
NIP . 19641231 198811 1 001

**Hj. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

## **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Fitri E.T Fauzi**  
No.Pokok : **B 111 10 256**  
Program : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak  
Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi  
Kasus Di Kota Makassar Pada Tahun 2008-  
2011)**

Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2014

An. Dekan

Pembantu Dekan I

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.**

**NIP. 1963041919890313003**

## ABSTRAK

FITRI E.T FAUZI (B111 10 256), "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus di Kota Makassar Pada Tahun 2008-2011)*" di bawah bimbingan Bapak Aswanto, sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah, sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pencurian aliran listrik di kota Makassar dalam kurun waktu empat tahun, serta untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik di kota Makassar.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan keadaan nyata dan data yang ada tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian aliran listrik di Kota Makassar serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis menyimpulkan antara lain: faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian aliran listrik yaitu faktor ekonomi dan faktor lemahnya penegakan hukum. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak PLN dan pihak Kepolisian adalah melakukan pemberitahuan kepada masyarakat melalui media televisi dan papan-papan reklame, melakukan penertiban yang dilakukan tim P2TL. Upaya represif merupakan penindakan bagi pelaku pencurian aliran listrik yang dilakukan pihak PLN yaitu memberikan sanksi berupa pemutusan listrik dan membayar denda, sedangkan pihak kepolisian memproses kasus tersebut sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus di Kota Makassar Pada Tahun 2008-2011)”**

Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tuaku Ayahanda Ir. M. Fauzi Azis, M.Si dan Ibundaku Yurico Leatemia Fauzi, S.E., sembah sujud ananda pada ayah dan bunda semoga skripsi ini menjadi awal pembuka jalan kesuksesan dan pembawa kebahagiaan buat ayah dan bunda. Kepada adikku yang tercinta, keluarga besar dan kepada semua orang yang selalu menyayangi penulis memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si, DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ansyori Ilyas, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S. DFM, selaku pembimbing I dan Hj. Haeranah, S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang telah membantu dan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H, Bapak H. M. Imran Arief, S.H.,M.S., dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen pengajar di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya.
8. Direktur PT. PLN (PERSERO) Cab. Makassar, Kapolrestabes Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian.
9. Teman-teman anggota KKN Gel. 85, Kabupaten Polman, Kecamatan Binuang dan khususnya teman-teman seposko di desa Kuajang.
10. Sahabat-sahabatku Fitriyanti Yusuf, Fitra ardyanti, Yustiana, Ary Amalya, Hikmah Ardiana, Royani Hakim.



11. Untuk teman spesial Muh. Richar, ibhe Amal, Andi Asriana, Ilmu Kalsum, dan teman-teman lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan.

12. Teman-teman seperjuangan Angkatan “LEGITIMASI 2010”.

Penulis percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa selalu memudahkan orang yang gemar memudahkan, Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa. Penulis sangat mengharapkan kritis dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Makassar, Januari 2014

Penulis

## Daftar Tabel

### Halaman

<b>Tabel1</b>	<b>Jumlah Pelanggan yang Melakukan Pencurian Aliran Listrik di Kota Makassar Tahun 2008-2011.....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel2</b>	<b>Jenis Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pelanggan di Kota Makassar Tahun 2008-2011 .....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 3</b>	<b>Jumlah Kasus Pencurian Aliran Listrik yang Di Proses di Kota Makassar Tahun 2008-2011 .....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel4</b>	<b>Pelaku Pencurian Aliran Listrik Berdasarkan Golongan Tarif di Kota Makassar Tahun 2008-2011.....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kriminologi .....	6
B. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	17
C. Pencurian .....	20
1. Pengertian Pencurian .....	20
2. Jenis-Jenis Pencurian.....	21

3. Unsur-Unsur Pencurian .....	27
D. Listrik.....	35
1. Pengertian Listrik .....	35
2. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan .....	38
E. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan.....	40
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	46
B. Jenis dan Sumber Data .....	46
C. Teknik Pengumpulan Data .....	47
D. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perkembangan Pencurian Aliran Listrik di Kota Makassar.....	49
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Aliran Listrik di Kota Makassar.....	57
C. Upaya Penanggulan Pencurian Aliran Listrik Di Kota Makassar .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengertian hukum pidana yang diungkapkan oleh Van Hamel dalam bukunya *Inleding Studie Nederlands Strafrecht*, memberikan definisi sebagai berikut (Moeljatno, 2009:8):

Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyeleggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatann yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial kepada masyarakat. Dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses berinteraksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Selain merupakan suatu hal yang sama sekali tidak menyenangkan bagi pihak yang tertimpa musibah kejahatan tersebut, di satu sisi kejahatan juga sulit dihilangkan dari muka bumi ini.

Kejahatan merupakan hasil reaksi sosial, sungguh pun demikian perlu diketahui pula kejahatan. Penjahat dan reaksi sosial merupakan kesatuan yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Perbuatan pidana bertentangan dengan norma hukum, salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian aliran listrik.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang yang dijelaskan oleh R.

Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, bahwa yang termasuk dalam arti barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian aliran listrik. Banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik, tidak terpaut dengan keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang rendah sehingga melakukan pencurian aliran listrik karena tidak mendapatkan aliran listrik di dalam rumahnya, namun ada pula pelaku yang berasal dari kalangan tingkat pendapatannya tinggi yang melakukan pencurian listrik karena tidak menginginkan membayar lebih dari yang seharusnya, padahal pemakaian listrik melebihi batas tenaga listrik yang telah ditentukan atau telah disepakati.

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk proposal dengan judul **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Kota Makassar Pada Tahun 2008-2011)**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan mengurangi kajian yang terlalu luas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik di Kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2008-2011?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak PLN di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik di Kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2008-2011.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat hukum dan pihak PLN dalam menanggulangi tindak pidana pencurian aliran listrik di Kota Makassar.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dapat menjadi bahan masukan bagi orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama dan seluruh masyarakat



secara umum sebagai pihak-pihak yang ikut bertanggungjawab terhadap meningkatnya tindak pencurian aliran listrik.

2. Dapat menjadi bahan masukan bagi aparat/petugas hukum dalam melakukan upaya-upaya preventif guna menyikapi terjadinya tindakan pencurian aliran listrik di kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Kriminologi**

Secara umum, istilah krimonolgi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi perancis. Secara etimologi, kriminologi berasal dari *crime* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya adalah ilmu, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan.

Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita-cita).

Dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum serta pencegahan (undang-undang). Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan

dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistemis disebut kriminologi. Inilah sebabnya orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan.

Pengertian akan kejahatan yang begitu luasnya dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun tetitorialitas, diantara penelitian, para sarjana atau para ahli serta masyarakat.

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini. Diantaranya adalah:

A.S. Alam (2010:1-2), di dalam bukunya memberikan definisi kriminologi menurut pandangan beberapa sarjana terkemuka, yaitu:

- Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Stephan Hurwitz (1986:3) memberikan definisi kriminologi sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:11) merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum: kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi kejahatan: merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
3. Penologi: pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Paul Moedigdo Moeliono (Soedjono D, 1976:24) memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Paul Moedigdo Moeliono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

J.M van Bemmelen dalam buku Hurwitz (1986:4) menyatakan kriminologi merupakan tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku kejahatan.

Sedangkan Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The sociology Of Crime and Delinquency* (Topo Santoso, 2001:12) memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Bonger (Topo Santoso, 2001:9) kemudian membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang penjahat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal: ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penology: ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Keseimbangan yang terganggu yang disebabkan oleh perbuatan yang oleh Negara di pidana itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian pula sebaliknya.

Ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor waktu dan tempat. Dengan kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan, dan sebaliknya. Juga bisa terjadi di suatu tempat sesuatu tindakan disebut jahat, sedang

di tempat lain bukan merupakan kejahatan. Dengan kata lain masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moekdikdo (Soedjono, 1975:5) merumuskan sebagai berikut:

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.”

Pengertian kejahatan yang disimpulkan dari beberapa pengertian pakar kriminologi menjadi 2 pengertian yaitu pengertian secara yuridis dan pengertian secara sosiologis. Berikut penjelasannya:

#### 1. Pengertian Kejahatan Secara Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan masih banyak lagi.

Jika membaca rumusan kejahatan di dalam Pasal 2 KUHPidana jelaslah bahwa yang dimaksud atau disebutkan dalam KUHPidana misalnya pencurian adalah perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHPidana seperti yang telah dirumuskan oleh R. Soesilo (1995:249) adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana

penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Jelaslah bahwa yang dipersalahkan mencuri adalah mereka yang melakukan perbuatan kejahatan dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHPidana. Secara yuridis formil, kejahatan adalah semua tingkah laku yang melanggar ketentuan pidana.

## 2. Pengertian Kejahatan Secara Sosiologis

Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (Inmoril) merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Akan tetapi pengertian kejahatan secara sosiologis, selain mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama#

Dalam mempersoalkan sifat dan hakikat atau perihal tingkah laku inmoril atau antisosial tersebut di atas, nampak adanya sudut pandang.



Subyektif apabila dilihat dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian tindak pidana**

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Selain istilah *strafbaar feit*, dipakai istilah lain yang berasal dari bahasa latin yaitu "*delictum*". Dalam bahasa Jerman disebut "*delict*", dalam Bahasa Perancis disebut delit dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tindak pidana dalam bahasa asing adalah "*delict*" yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.

Begitu sulit memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandang mereka yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman akan istilah *strafbaarfeit*.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2010:71) memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Menurut van Hamel (Leden Marpaung, 2008:7), tindak pidana adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

H.R Abdussalam (2006:3) memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* sebagai:

Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawa hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana.

Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
2. Definisi panjang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pompe (P.A.F Lamintang, 1997:183) juga memandang *strafbaarfeit* dari 2 (dua) segi, yaitu:

1. Dari segi teoritis, *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, *strafbaarfeit* adalah tindak lain daripada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Dari definisi yang dirumuskan oleh pompe tersebut, memberikan pemahaman bahwa definisi dari segi teoritis menjelaskan akan suatu perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dan harus dijatuhi hukuman terhadap pelaku demi ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, sedangkan pengertian dari segi hukum positif sangatlah berbahaya yakni dengan semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana segera disadari apabila melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar "*strafbare feiten*" yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari "*strafbare feiten*" tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu "*strafbaar feit*", yakni bersifat "*wederrechtelijk*", "*aan schuld te wijten*" dan "*strafbaar*" atau yang bersifat "melanggar hukum", "telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja" dan "dapat dihukum".

Pengertian tentang *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh pompe memiliki keterkaitan dengan pengertian yang dirumuskan oleh Simons tentang *strafbaarfeit*.

Simons (Adami Chazawi, 2010:75) memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* sebagai:

Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Hazewinkel-Suringa (P.A.F Lamintang, 1997:18) telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaarfeit*" yaitu:

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana.

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, (Lamintang, 1984:184) sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 1988:104) menyatakan bahwa:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:10) mengemukakan bahwa:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam (Tongat, 2006:4) yaitu:

1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
  - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
  - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat “ yang dilarang dan diancam undang-undang adalah akibat berupa matinya orang.
  - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah tempat umum.

2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (*dader*) yang berupa:
  - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan bertanggung jawab).
  - b. Kesalahan atau *schuld* berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :
    - 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan akan juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
    - 2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
    - 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut (Tongat, 2006:5).

Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur objektif, terdiri atas :
  - a. Perbuatan orang;
  - b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
  - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
2. Unsur subjektif, terdiri atas :
  - a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
  - b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtedelicten*. Sementara pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

## **C. Pencurian**

### **1. Pengertian Pencurian**

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat.

Mengingat akan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk memberikan uraian istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-sarjana lain baik yang berkecimpung di bidang hukum maupun diluar bidang hukum.



Para sarjana tidak memberikan definisi tentang pencurian, tetapi unsur-unsur dan elemen–elemennya saja yang berdasarakan Pasal 362 KUHP, diantaranya R. Soesilo (1995:249) mengemukakan bahwa:

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan, pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-

Menurut Andi Hamzah (2009:100), delik pencurian adalah delik yang paling umum tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua Negara.

Hingga saat ini, penulis belum menemukan satu pun definisi tentang pencurian. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh sangat luasnya hal-hal yang dicakup karena adanya kualifikasi dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

## **2. Jenis-Jenis Pencurian**

Pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 (lima) yaitu:

### **a. Pencurian biasa**

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”.

Menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1995:249) menjelaskan unsur-unsur pencurian biasa yaitu sebagai berikut :

- 1) Elemen-elemen pencurian biasa sebagai berikut:
  - Perbuatan “mengambil”
  - Yang diambil harus “sesuatu barang”
  - Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
  - Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).
- 2) “Mengambil” = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpidah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.
- 3) “Sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

- 4) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. “Sebagian kepunyaan orang lain” misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah “dibuang” oleh yang punya dan sebagainya.
- 5) “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan ke polisi, akan tetapi setelah datang di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan ke polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.

#### **b. Pencurian Ringan**

Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- 1) Pencurian dalam bentuk yang pokok (Pasal 362)

- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 (1) ke-4 KUHP), atau
- 3) Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambarnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :
  - Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah.
  - Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

#### **c. Pencurian dengan Pemberatan**

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian berat, apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, juga harus memenuhi unsur lain yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP.

Andi Hamzah (2009:173) menerjemahkan Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun :
  - a) Pencurian ternak
  - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
  - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

#### **d. Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana (Soesilo, 1995:253) ini adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
  - Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
  - Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun .
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika

perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.

#### **e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga**

Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menyatakan :

- (1) Jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
- (2) Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- (3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri)

atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

### **3. Unsur-Unsur Pencurian**

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP R.

Soesilo (1995:249) yang menyatakan sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 KUHP, maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Barang siapa
- b) Mengambil
- c) Sesuatu barang
- d) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- e) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Berdasarkan rumusan dari Pasal 362

KUHP, maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori unsur-unsur pencurian, yaitu:

**a) Unsur-Unsur Obyektif**

**(1) Mengambil**

Unsur perbuatan mengambil barang dengan maksud bahwa suatu barang berada dalam penguasaan mutlak dan mengakibatkan putusanya hubungan antara barang dengan orang yang memilikinya.

Menurut Lamintang (1989:13) yang secara lengkap dalam bahasa Belanda berbunyi:

*“Wegnemen is ene gendraging wa ardor man het goed brengthinzijn feitolijske heerrchappij, bedoeling die men ten opzichte van dat goed verder koestert”.* (mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata atau berada dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut).

Mengambil adalah mengambil untuk dikuasi. Maksudnya untuk mengambil barang itu dan barang tersebut belum dalam kekuasaannya, apabila sewaktu memiliki barang itu telah berada ditangannya, maka perbuatan bukan pencurian tapi penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pengambilan (pencurian) itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila mana seseorang baru memegang saja barang tersebut dan belum



berpindah tempat, maka perbuatan itu belum dikatakan pencurian, melainkan “mencoba mencuri” (Soesilo, 1995:250).

Perkembangan dalam hukum pidana menyebabkan pengertian perbuatan “mengambil” dapat pula mengalami penafsiran yang luas, seperti yang dipakai oleh pembuat Undang-Undang yaitu tidak terbatas dengan tangan saja melainkan bisa juga mengambil dengan kaki, atau dengan menggunakan satu macam alat lain, sebagaimana teori alat dalam hukum pidana. Misalnya, dengan sepotong kayu atau besi ataupun menghabiskan bensin dalam mengendarai kendaraan tanpa seizing pemiliknya, walaupun tidak berniat mengambil kendaraan itu.

Disamping itu mengambil aliran listrik dari suatu tempat yang dikehendaki dengan cara menempatkan sepotong kabel untuk mengalirkan muatan aliran listrik tanpa melalui alat ukur Perusahaan Listrik Negara (PLN), telah dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan pencurian.

Beberapa teori yang terdapat di dalam doktrin menjelaskan tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni:

- Teori Kontrektasi

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

- Teori Ablasi

Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

- Teori Aprehensi

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.

## (2) Sesuatu Barang

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Menurut R. Soesilo (1995:250) memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai

ekonomis termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya.

Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Pada mulanya bend-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak saja (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi benda bergerak. Misalnya, sebatang pohon yang telah ditebang, atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan.

Pada tahun 1921 pengertian kata “barang” hanyalah diartikan barang yang berwujud saja karena pada waktu itu tidak ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil, namun karena

perkembangan lptek ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil yaitun “aliran listrik“. Pada tanggal 23 Mei 1921, Arrest Hoge Raad memperluas arti kata barang yang tidak berwujud yaitu aliran listrik sehingga orang yang melakukan pencurian listrik dapat dijatuhi pidana karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

(3) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHP.

Misalnya sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan si B lalu menjualnya. Akan tetapi berbeda halnya apabila semua sepeda tersebut berada halnya apabila semua sepeda tersebut berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Pengertian “orang lain” dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara. Jadi benda yang

dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

#### **b) Unsur-Unsur Subyektif**

##### **(1) Maksud untuk memiliki**

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan dari dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan yang kedua menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja. Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

## (2) Melawan hukum

Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini berarti bahwa “melawan hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan yang dipandang bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

Menurut Moch. Anwar (1986:56), suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini bersifat melawan hukum.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang (2009:33) menyebutkan bahwa:

Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara memalsukan suarat kuasa, dan sebagainya.

Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subyektif.

## **D. Listrik**

### **1. Pengertian listrik**

Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital. Baik bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya.

Listrik pertama kali ditemukan oleh Thomas Alpha Edison pada awal abad 18 dan di Indonesia, energi listrik pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Belanda ketika selama 350 tahun menjajah wilayah nusantara.

Thales dari Milete (540-546 SM) menyebutkan bahwa gejala listrik statis terjadi pada batu ambar yang digosok dengan bulu. Ternyata batu ambar tersebut dapat menarik benda-benda ringan yang lain misalnya bulu ayam, dalam bahasa Yunani batu ambar sering disebut elektron.

Menurut Benjamin Franklin (1706–1790), adanya perpindahan muatan dari benda satu ke benda yang lain merupakan implikasi dari hukum kekekalan muatan, artinya pada saat terjadi gosokan antara dua benda, tidak menciptakan muatan listrik baru namun prosesnya merupakan perpindahan muatan dari satu benda ke benda yang lain.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa :

“tenaga listrik adalah segala sesuatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.”

Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemeerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakkan-kebijakkan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan penyedian tenaga Istrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, menyebutkan bahwa :



“ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.”

Di tengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan teknologi dengan listrik sebagai alat baik di kota maupun di desa-desa atau di berbagai pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat itulah, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada sejengkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat membutuhkan listrik, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas semua akan membutuhkan aliran listrik.

Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah nasib mereka atau nasib masyarakat. Namun di balik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik yang sering disebut sebagai pencurian listrik.

## **2. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan**

### **a. Ketentuan Pidana Ketenagalistrikan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985**

Ketentuann pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 diatur dalam Bab X Pasal 19-23, yakni sebagai berikut :

#### **Pasal 19**

“Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

#### **Pasal 20**

- 1) Barang siapa melakukan usaha penyedia tenaga listrik tanpa Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana dengan penjara selam-lamanya 6 (enam) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3).
- 3) Barang siapa melakukan usaha penyedia tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah,

bangunan, dan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dicabut Usaha Ketenagalistrikannya.

#### Pasal 21

- 1) Barang siapa karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- 2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- 3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.
- 4) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 22

- 1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum

yang tidak menaati ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- 2) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

#### Pasal 23

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 adalah kejahatan.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelanggaran.

### **E. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan**

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi, (Moeljatno, 1986:36). Ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga fakta tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor keturunan keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
- b. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.
- c. Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam (2010:45) dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Anomie (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).
2. *Cultural Deviance*(penyimpangan budaya).
3. *Social Control* (kontrol sosial).

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok

dan sebagainya, sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Menurut Nandang Sambas (2010:121-122), salah seorang tokoh dari teori anomie adalah ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim yang menekankan teorinya pada “normlessness, lessens social control” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap kemerosotan mmoral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Tran sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma. Kebingungan dan berkurangnya control sosial individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden (A.S Alam, 2010:46) berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
2. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.

3. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi 'samar pola' (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.

## **F. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun waktu dan tempatnya berlainan, tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H Sutherland (Romli Atmasasmita, 1984:68), dalam pelaksanaan crime prevention ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*.

Merupakan suatu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (*preventif*).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dirumuskan oleh A.S Alam memiliki kesamaan dengan upaya penanggulangan yang dikemukakan oleh E.H Sutherland, namun A.S. Alam (2010:79-80) membaginya menjadi tiga bagian pokok, yaitu :

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.



2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Bernest dan Teeters (Romli Atmasasmita, 1983:79) menunjukkan beberapa cara untuk menaggulangi kejahatan, yaitu :

1. Menyadari, bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan doronga-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Pendapat Bernest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor-faktor yang sekunder saja.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar khususnya di Polrestabes Makassar dan di PT. PLN (PERSERO) Cab. Kota Makassar di kota Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian di kota Makassar karena kota Makassar merupakan daerah terbesar dan terkemuka di Provinsi Sulawesi Selatan dan menurut pantauan penulis dari segi manfaat serta kontribusi yang dicapai maka kota Makassar merupakan lokasi yang tepat untuk meneliti akan tingkat pencurian listrik yang ada di Kota Makassar.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu perundang-undangan di bidang pidana, yaitu KUHP, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, serta sumber lain yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi terhadap pencurian listrik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
2. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku, koran, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Data primer, dengan melakukan wawancara dengan pihak Sat. Reskrim Polrestabes Makassar dan pihak PT. PLN (PERSERO) Cab. Kota Makassar.
2. Data sekunder, dengan membaca dan menelaah berbagai literatur yang meliputi undang-undang, buku-buku, koran dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk data-data dari internet.

### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang

dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pencurian Aliran Listrik di Kota Makassar**

Tindak kejahatan khususnya pencurian aliran listrik merupakan tindakan yang tidak biasa lagi, tetapi sudah meraja lela di kota Makassar. Hal tersebut disebabkan karena setiap manusia membutuhkan energi listrik untuk melangsungkan kehidupannya. Hal lain yang menyebabkan seseorang mencuri aliran listrik karena dalam diri manusia ada rasa tidak puas dan rasa tidak puas tersebut yang menyebabkan seseorang tidak puas dengan daya listrik yang diberikan kepadanya dengan menyatakan bahwa daya listrik tersebut kecil namun ingin membayar dengan harga yang murah padahal menggunakan daya listrik yang besar harus pula membayar dengan harga yang besar pula. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang mau melakukan pencurian aliran listrik.

Berikut penulis akan memaparkan data pencurian aliran listrik di kota Makassar yang terdiri dari data jumlah pelanggan yang diperiksa, jumlah pelanggan yang ditemukan melakukan pencurian listrik sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di PT. PLN (PERSERO) Cab. Makassar yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Data Pelanggan yang Melakukan Pencurian Aliran Listrik di Kota Makassar Tahun 2008-2011

No.	Tahun	Pelanggan yang Diperiksa	Jumlah temuan	Persentase (%)
1.	2008	-	-	-
2.	2009	2,868	325	20%
3.	2010	2,555	431	26,5%
4.	2011	1,750	871	53,5%
Jumlah		7,173	1.627	100 %

Sumber Data : PT. PLN (PERSERO) Cab. Makassar 2014

Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah kasus Pencurian Aliran Listrik di Kota Makassar selama 4 tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila dapat diuji maka dapat dilihat pada tahun 2008 kasus pencurian listrik belum dapat dipastikan ada data pencurian karena pada tahun tersebut data pencurian listrik masih sangat minim dan data yang di masukan hanya menggunakan sistem manual tidak menggunakan sistem data base sehingga susah untuk menyelidiki berapa pelanggan yang melakukan pencurian listrik, menurut Bapak Syaiful (wawancara 17 Januari 2014), pada tahun 2009 jumlah pelanggan yang diperiksa sebanyak 2.868 pelanggan dan jumlah yang ditemukan melakukan pencurian aliran listrik atau pelanggaran sebanyak 325 atau sekitar 11,3%, pada tahun 2010 jumlah pelanggan yang diperiksa sebanyak 2.555 pelanggan dan yang ditemukan melakukan pencurian listrik atau pelanggaran sebanyak 431 atau sekitar 16,9%, pada tahun 2011 jumlah pelanggan yang diperiksa sebanyak 1.750 pelanggan dan jumlah yang ditemukan melakukan pelanggaran atau pencurian listrik sebanyak 871

atau sekitar 49,8%. Dari hasil persentase tersebut dapat membuktikan bahwa dari tahun ke tahun, pelanggan yang melakukan pencurian listrik semakin bertambah bukan semakin menurun.

Menurut Bapak Syaiful Bagian Data (wawancara 17 Januari 2014) menjelaskan bahwa jumlah temuan tersebut terdiri dari beberapa jenis pelanggaran yang telah dikategorikan dalam Keputusan Direksi PT. PLN Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Berikut hasil data pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, yaitu pada table di bawah ini:

Tabel 2  
Data Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pelanggan di Kota Makassar  
Tahun 2008-2011

No.	Tahun	P-I	P-II	P-III	P-IV	K-I	K-II	K-III	Energi (kWh)	Persentase (%)
1.	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	2009	175	59	62	-	2	21	6	2,121,134	7%
3.	2010	223	30	119	9	-	48	2	6,384,032	21,1%
4.	2011	341	129	59	309	3	30	-	21,813,042	71,9%
Jumlah									30,318,208	100%

Sumber data : PT. PLN (PERSERO) Cab. Makassar 2014

Melihat dari tabel 2 di atas menjelaskan bahwa setiap tahun energi (kWh) yang digunakan oleh pelanggan yang melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh pihak PLN, bertambah terus menerus dan pada tahun 2011, energi (kWh) yang digunakan lebih besar yaitu sebesar 71,9% sehingga pada tahun 2011, pihak PLN mendapatkan kerugian sebesar Rp. 5,768,743,444,-.

Ada pun pengertian atau arti dari jenis-jenis pelanggaran yang terdapat dalam tabel tersebut menurut Keputusan Direksi PT. PLN Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dalam Pasal 13, yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran Golongan I (P-I) adalah Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya;
2. Pelanggaran Golongan II (P-II) adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi;
3. Pelanggaran Golongan III (P-III) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
4. Pelanggaran Golongan IV (P-IV) adalah pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.

Sedangkan arti dari K-I, K-II, dan K-III menurut Bapak Syaiful yaitu sebagai berikut:

1. K-I adalah kelalaian yang dilakukan oleh pelanggan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor kali yang terbaca dalam alat ukurnya. Contohnya, seorang pelanggan yang memulai bisnis dengan menggunakan rumahnya sebagai tempat bisnisnya, seharusnya pelanggan tersebut mengganti daya listriknya semakin besar tetapi karena kelalaiannya sehingga alat ukur membaca kelebihan dalam mempergunakan daya tersebut.
2. K-II adalah kelalaian pelanggan yang menyebabkan pelanggan tersebut membayar lebih. Contohnya, pelanggan A menjual



rumahnya ke pelanggan B, tetapi pelanggan B tidak mengganti meteran rumah tersebut sehingga pelanggan A yang mempunyai rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah lamanya mencantolkan listriknya ke meteran rumah pelanggan B. Hal tersebut yang menyebabkan pelanggan B membayar lebih. Kejadian tersebut sering terjadi di perkampungan sampai di perkotaan.

3. K-III terjadi karena dipengaruhi oleh waktu, yaitu alat yang sudah lama, meteran yang berkarat atau sudah dimakan waktu sehingga menyebabkan kelainan terhadap alat ukur itu sendiri. K-III juga bisa terjadi karena kelalaian dari pihak PLN.

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT. PLN Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dalam Pasal 14 ayat (1) menjelaskan tentang sanksi bagi pelanggan yang melanggar P-I, P-II, dan P-III. Sanksi untuk P-I, P-II, dan P-III yaitu:

- a. Pemutusan sementara;
- b. Pembongkaran rampung;
- c. Pembayaran tagihan susulan;
- d. Pembayaran biaya P2TL lainnya.

Sedangkan sanksi untuk P-IV yang merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2), yaitu:

- a. Pembongkaran rampung;
- b. Pembayaran TS4;
- c. Pembayaran biaya P2TL lainnya.

Dalam peraturan yang telah disahkan oleh Keputusan Direksi Jendral Ketenagalistrikan Nomor: 33.12/23/600.1/2012 tentang: Pengesahan Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, menurut Bapak Syaiful bahwa peraturan tersebut telah berjalan dengan efektif namun kadang peraturan tersebut berjalan bersamaan dengan kebijakan jadi kadang peraturan tersebut tidak berjalan sesuai dengan semestinya.

Dalam wawancara penulis dengan ibu Rani (16 Januari 2014) yang menggunakan tempat usahanya sebagai rumahnya. Ibu tersebut mendapatkan listrik bukan dari pihak PLN, tetapi mendapatkan listrik dari rumah besar sebelah warung atau tempat usaha ibu tersebut. Ibu itu membayar perharinya kepada pemilik rumah yang mempunyai listrik tersebut. Dalam peraturan yang ada, kelakuan yang dilakukan oleh ibu tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan tetapi menurut pihak PLN, hal tersebut dizinkan selama pemilik rumah tersebut membayar listrik sesuai yang tertulis di dalam rekening listrik dan pemilik rumah tidak mengambil daya listrik yang berlebihan dari daya yang telah dia pasang. Hal tersebut dizinkan karena melihat dari sisi kemanusiaannya sehingga pihak PLN memberikan kebijakan kepada pedagang-pedangan tersebut.

Bukan hanya dari kalangan yang diatas yang dapat menikmati energi listrik tetapi dari kalangan yang dibawah pun dapat menikmati aliran listrik tersebut walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, asalkan tidak mengambil listrik langsung dari tiang listrik atau trafo PLN yang ada di jalanan. Hal tersebutlah yang dapat merugikan pihak PLN dan Negara karena banyaknya pelanggan ilegal (bukan pelanggan).

Untuk penelitian selanjutnya, penulis melakukan penelitian di Polrestabes Makassar dengan mengambil data mengenai pencurian listrik di Kota Makassar. Berikut penulis akan memaparkan data pencurian aliran listrik di kota Makassar yang terdiri dari data jumlah kasus yang dilaporkan dan kasus yang diproses yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Data Kasus Pencurian Aliran Listrik di Kota Makassar  
Tahun 2008-2011 yang Dilaporkan dan Kasus yang Diproses

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Kasus yang Diproses
1.	2008	-	-
2.	2009	1	1
3.	2010	-	-
4.	2011	-	-
Jumlah		1	1

Sumber Data : Polrestabes Makassar tahun 2014

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizky Yosphia (wawancara 24 Januari 2014), menjelaskan bahwa pada tahun 2008-2011 hanya ada satu kasus yang diproses yaitu pada tahun 2009, tetapi kasus tersebut

tidak sampai divonis atau dijatuhi hukuman penjara. Ada pun contoh kasusnya yaitu sebagai berikut:

Pada tahun 2009, lokasi kejadian berada di perumahan Yasmin, Boulevard panakukang. Pada saat itu, pihak kepolisian di panggil oleh pihak PLN untuk melakukan penyelidikan karena pelanggan tersebut telah dicurigai oleh petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Pada saat tiba di lokasi kejadian, ternyata pelanggan PLN tersebut benar melakukan pencurian aliran listrik selama 3 bulan lamanya, dengan cara menggunakan daya lebih dari suatu mesin tetapi tidak memasukan izin permintaan kepada PLN. Pelanggan tersebut bekerjasama dengan pihak kontraktor yang sudah dikenal baik oleh pihak PLN. Hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu 131 unit mesin kWh yang disita dan pada saat itu listrik pelanggan tersebut di cabut oleh P2TL. Kasus tersebut sempat diproses namun tidak sampai di jatuhi vonis karena pihak kontraktor telah melakukan pendekatan dengan pihak PLN.

Sistem yang digunakan oleh pihak PLN, bukanlah sistem yang menggunakan jalur ke rana hukum tetapi mereka lebih menggunakan sistem ganti rugi. Padahal jelas tertulis dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa:

“Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Hal tersebut yang menyebabkan tidak ada kasus yang diproses oleh pihak kepolisian dan kita tidak pernah mendengar bahwa orang yang melakukan pencurian aliran listrik di hukuman penjara.

#### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Aliran Listrik**

Setiap manusia akan merasa kurang puas dengan keadaan yang ada, sehingga perasaan tidak puas itu sering timbul perkiraan yang kurang baik akhirnya berbuat yang tidak diinginkan atau kurang baik yang sering berakibat perbuatan yang melanggar hukum. Begitu juga terhadap pencurian aliran listrik itu dapat terjadi kepada siapa saja, baik itu kalangan atas sampai pada kalangan bawah, baik kelompok atau perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta atau pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pencurian listrik bukan hanya biasa dilakukan oleh kalangan bawah tetapi kalangan menengah dan kalangan atas yang lebih banyak melakukan pencurian listrik. Mereka mempunyai keinginan menggunakan daya yang lebih tetapi tidak ingin membayar lebih sesuai dengan daya yang digunakan.

Berdasarkan Penelitian penulis di PLN, penulis dapat menjabarkan tentang status sosial pelaku pencurian aliran listrik berdasarkan golongan tarif yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4

Pelaku Pencurian Aliran Listrik Berdasarkan Golongan Tarif di Kota Makassar Tahun 2008-2011

No.	Jenis Pelanggan sesuai Golongan Tarif	Frekuensi	Persentase(%)
1.	Sosial	36	2,2%
2.	Rumah Tangga	1.363	83,8%
3.	Bisnis	204	12,5%
4.	Industri	12	0,7%
5.	Publik	12	0,7%
<b>Jumlah</b>		<b>1.627</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : PT. PLN (PERSERO) Cab. Makassar 2014

Melihat dari tabel 4 di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian listrik antara lain:

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam melakukan pencurian listrik yang dapat melatarbelakangi seseorang untuk berani dalam melakukan hal tersebut. Perasaan yang tidak puas pun yang membuat seseorang berani dalam melakukan pencurian listrik. Berdasarkan tabel 4 di atas yang menjelaskan bahwa yang banyak melakukan pelanggaran atau pencurian listrik berasal dari pelanggan rumah tangga yang merupakan kalangan menengah ataupun bisa saja berasal dari kalangan atas.

Definisi pelanggan rumah tangga berdasarkan golongan tarif yang ditetapkan oleh pihak PLN adalah pelanggan perseorangan atau badan sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk keperluan rumah tangga. Contohnya, yaitu:

- a. Rumah untuk tempat tinggal
- b. Kelompok rumah kontrakan
- c. Rumah susun milik peorangan
- d. Rumah susun milik perumnas
- e. Asrama keluarga pegawai perusahaan swasta
- f. Asrama mahasiswa

Beberapa faktor yang menyebabkan pelanggan rumah tangga lebih banyak ditemukan melakukan pencurian listrik yaitu:

- a. Adanya rasa tidak puas dalam menggunakan daya yang telah diberikan oleh pihak PLN, tetapi ingin membayar dengan nominal yang kecil.
- b. Melakukan pelanggaran dengan menyadap aliran listrik karena alat-alat yang terdapat dalam rumah serba elektronik dan membutuhkan daya yang tinggi dan daya yang telah di berikan oleh PLN di dalam rumah tersebut tidak mencukupi daya yang dibutuhkan.
- c. Menjadikan tempat tinggal sebagai tempat usaha yang membutuhkan pembayaran rekening listrik kecil agar mendapatkan keuntungan yang besar. Misalnya: rumah kost untuk mahasiswa.

Berdasarkan tabel 4 di atas, bukan hanya pelanggan rumah tangga yang memiliki persentase besar dalam melakukan pencurian listrik tetapi pelanggan dari golongan tarif bisnis juga memiliki persentase yang besar pula atau sekitar 12,5%. Hal ini membuktikan bahwa keinginan seseorang yang mau menggunakan daya listrik yang besar karena suatu kebutuhan yang dapat melangsungkan kehidupannya tetapi tidak mau membayar rekening listrik yang besar pula.

Faktor ekonomi dapat membuat seseorang menghalalkan segala cara dengan mengorbankan hal kecil yang sebenarnya bisa menghasilkan hal baru yaitu akibat dari pencurian listrik itu sendiri. Contohnya:

- a. Terjadi kehilangan tegangan (loses) maupun pusat jaringan yaitu tegangan yang didistribusikan atau yang dijual tidak sesuai dengan rupiah pendapatan, yang berakibat pada perusahaan listrik (PLN).
- b. Beban trafo akan menjadi Over Beban (OB) yang berakibat fatal yaitu akan terjadi trafo meledak, karena muatan melebihi kapasitas yang tersedia atau kemampuan trafo terbatas.
- c. Perusahaan listrik (PLN) mengalami kerugian akibat pengalihfungsian dari tarif sosial dijadikan tarif rumah tangga tanpa ada laporan ke PLN sehingga energi yang didistribusikan tidak sesuai dengan rupiah yang diterima.



- d. Perusahaan listrik (PLN) mengalami kerugian akibat pengalihfungsian dari tarif sosial menjadi tarif usaha tanpa ada laporan pada PLN, sehingga energi yang dijual tidak sesuai dengan rupiah pendapatan.
- e. Perusahaan listrik (PLN) mengalami kerugian karena terjadi arus balik yang berakibat fatal kepada konsumen sendiri sebab cara penyambungan tidak benar atau daya yang diambil besar tanpa ada pembatas, sehingga energi yang didistribusikan tidak sesuai dengan rupiah pendapatan.

## **2. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum**

Hukum yang telah dibuat sangatlah bagus jika hukum tersebut di terapkan atau dijalankan sesuai seperti yang diatur. Dalam kasus pencurian listrik, pihak PLN lebih menegakan atau menjalankan peraturan yang baru saja disahkan yaitu, Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Dalam peraturan tersebut menyebutkan pelanggan yang melakukan pelanggaran seperti yang tertulis dalam Pasal 13, dikenakan sanksi pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan, dan pembayaran biaya P2TL lainnya.

Hal tersebut yang kadang membuat pelanggan masih saja melakukan pelanggaran atau pencurian aliran listrik.

Pihak kepolisian yang berperan sebagai penyidik dalam kasus pencurian listrik tersebut hanya menjalankan perintah dari pihak PLN yang memerintahkan untuk mendampingi petugas P2TL sekaligus menyelidiki kasus tersebut apakah merupakan pencurian listrik atau tidak. Dalam hal memberikan hukuman pidana, pihak kepolisian hanya mengikuti dari pihak PLN karena dari sistem PLN itu sendiri yang lebih mengutamakan membayar ganti rugi atau Tagihan Susulan (TS).

### **C. Upaya Penanggulangan Pencurian Aliran Listrik**

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian aliran listrik serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya.

Kejahatan pencurian listrik jika dibiarkan dapat merugikan masyarakat dan Negara. Akibat dari pencurian listrik bisa melibatkan masyarakat yang sebenarnya tidak ikut melakukan hal tersebut. Misalnya karena 1 orang yang melakukan pencurian listrik dan mengakibatkan kebakaran sehingga para tetangga dari rumah atau tempat usaha tersebut ikut mengalami kebakaran.

Oleh karena itu, kejahatan pencurian harus dilenyapkan, tetapi untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pencurian. Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian aliran listrik di kota Makassar.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syaiful (wawancara 17 Januari 2014) tentang upaya-upaya penanggulangan pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh pihak PLN yaitu membentuk petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Petugas tersebut bertugas sebagai berikut:

- melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP dan Perlengkapan APP serta Instalasi pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik;
- melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik;
- mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya;
- menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL dan Berita Acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL;
- menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas Administrasi P2TL dengan

dibuatkan Berita Acara serah terima dokumen dan Barang Bukti P2TL.

Hasil dari pembentukan P2TL membantu pihak PLN dapat meminimaliskan terjadinya pencurian aliran listrik karena P2TL dapat mengontrol dan memeriksa aliran listrik yang keluar dari setiap instalansi tenaga listrik. Sebagai bukti dari berkurangnya pencurian aliran listrik dilihat dari data tahun 2012.

Pada tahun 2012, energi (kWh) yang dikeluarkan secara illegal yaitu 4.065.743 sedangkan pada tahun 2011 yaitu 21.813.042. Dilihat dari perbedaan energi yang dikeluarkan pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun 2011, hal tersebut disebabkan karena terbentuknya P2TL yang bertugas dengan sebaik-baiknya.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak PLN untuk mencegah terjadinya pencurian aliran listrik, yaitu:

**a) Upaya Preventif**

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya. Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting

agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung.

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak PLN antara lain sebagai berikut:

- Memberitahukan kepada masyarakat dengan menyiarkan ke televisi bahwa melakukan pencurian listrik sangatlah berbahaya akibatnya.
- Menyebarkan pengumuman dengan kata bijak kepada masyarakat bahwa melakukan pencurian listrik adalah tindakan yang tidak baik.
- Memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan hukum yang menjerat jika melakukan pencurian listrik.
- Memerintahkan tim P2TL untuk turun ke lapangan dan menertibkan pelanggan ataupun bukan pelanggan yang didapat telah melakukan pencurian listrik.

#### **b) Upaya Represif**

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain bahwa pelaku yang telah melakukan kejahatan tersebut telah diberikan hukuman oleh penegak hukum. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak PLN, antara lain sebagai berikut:

- Ketika pelanggan tertangkap telah melakukan pencurian listrik maka pelanggan diberikan sanksi pencabutan listrik, sedangkan yang bukan pelanggan dilakukan pembongkaran aliran listrik ditempat.
- Pihak PLN akan memanggil pelanggan dan bukan pelanggan yang bersangkutan ke kantor untuk diberikan pengertian dan memberitahukan untuk membayar kerugian yang sesuai dengan pemakaian daya yang illegal tersebut.
- Jika pelanggan tidak membayar kerugian yang disebabkan karena mencuri aliran listrik maka pihak PLN tidak akan memasang kembali listriknya dan bisa saja pelanggan tersebut di blacklist dari daftar pelanggan. Sedangkan yang bukan pelanggan, bisa diserahkan di pihak kepolisian.

Dalam kasus pencurian aliran listrik di kota Makassar, pihak kepolisian melakukan tugasnya tetapi atas perintah atau pemberitahuan dari pihak PLN. Tugas pihak kepolisian yaitu mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Ketika terbukti melakukan pencurian listrik maka pelanggan

atau bukan pelanggan diberikan hukuman sesuai dengan sanksi pidana yang telah diatur mengenai ketenagalistrikan.

Segala upaya telah dilakukan oleh pihak PLN dan pihak kepolisian, tetapi karena naluri manusia yang memiliki rasa tidak puas terhadap penggunaan listrik maka pencurian listrik tetaplah ada. kesadaran yang berasal dari sendiri yang dapat menyadarkan seseorang dari kejahatan yang dilakukannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa faktor seseorang melakukan pencurian aliran listrik di kota Makassar adalah faktor ekonomi dan penegakan hukum yang lemah sehingga pencurian aliran listrik tetap saja terjadi.
2. Upaya yang diberikan dalam menanggulangi pencurian aliran listrik di kota Makassar dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat mengubah sifat negatif seseorang menjadi sifat positif dan dapat memberikan pengetahuan akan bahaya melakukan pencurian listrik sedangkan upaya represif dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian aliran listrik.

#### **B. Saran**

Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus pencurian aliran listrik, olehnya itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian aliran listrik, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang



berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdusalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Atmasasmita, Romli. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hurwitz, Stephan. 1986. *Kriminologi*, Disadur oleh L. Moeljatno. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P.AF dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sambas, Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grifindo Persada.

Soedjono. D. 1976. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politea.

Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press

#### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

#### **Sumber Internet :**

<http://ii-i.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-definisi-listrik.html>

<http://www.artikelbagus.com/2011/08/listrik-statis-muatan-listrik.html>

<http://trisasunawar.blogspot.com/2013/03/penafsiran-dalam-hukum-pidana.html>

# L A M P I R A N